

## Peningkatan Pembangunan Ekonomi Untuk Kualitas Hidup Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Fauzuna Naufal Wijanarko  
Universitas Diponegoro Semarang  
Email: [fauzunanaufalwijana@students.undip.ac.id](mailto:fauzunanaufalwijana@students.undip.ac.id)

Rini Dwi Susanti  
Institut Agama Islam Negeri Kudus  
Email: [rinidwi@iainkudus.ac.id](mailto:rinidwi@iainkudus.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze economic development towards improving the quality of human life in the Special Region of Yogyakarta from 2013 to 2019. Theoretically, the Human Development Index (IPM) measures human resources and is used as a standard indicator of human welfare. The HDI indicator is based on the quality of health, education and people's purchasing power. An increase in the HDI value indicates that there has been an increase in human welfare and rate in an area. Human Development Index (IPM) is the dependent variable, while capital expenditure, poverty, Regional Minimum Wage (UMP), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) are independent variables. The research approach uses a fixed effect model: panel data. Partial research results show that capital expenditure has a positive but not significant effect on HDI, while poverty has a negative and insignificant influence on HDI. In addition, UMP and GRDP have a significant positive impact on HDI. Simultaneously, poverty, capital expenditure, UMP and GRDP substantially influence the HDI in the Special Region of Yogyakarta.*

**Keywords:** *Human Development Index, Poverty, Provincial Minimum Wage, Government Expenditure, Gross Regional Domestic Product.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembangunan ekonomi terhadap peningkatan kualitas hidup manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2019. Secara teoritis, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan metode pengukuran sumber daya manusia yang dijadikan standar indikator kesejahteraan manusia. Indikator IPM didasarkan pada kualitas kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan dan kualitas manusia di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen, sedangkan belanja modal, kemiskinan, Upah Minimum Regional (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel independen Pendekatan penelitian menggunakan *fixed effect model* yang bersifat data panel. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Selain itu, UMP dan PDRB memiliki dampak positif yang signifikan terhadap IPM. Secara simultan, kemiskinan, belanja modal, UMP dan PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Kata Kunci:** Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi.

## 1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu langkah pemerintah guna membuat perubahan yang lebih baik. Perubahan memiliki tujuan utama yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang tidak serta merta tentang infrastruktur, sosial, politik, ataupun nilai-nilai masyarakat melainkan juga tentang pembangunan kualitas hidup manusia. Dalam sebuah pembangunan manusia, faktor produksi adalah hal pokok dalam kapasitas produksi. Faktor produksi yang berkualitas memiliki guna dalam menambah jumlah produktifitas nasional. Maka kunci dalam tujuan pembangunan adalah SDM yang

berkualitas. Alasan fundamental inilah yang memberikan gambaran dibutuhkan masyarakat yang terampil, berintegritas dan berkualitas.

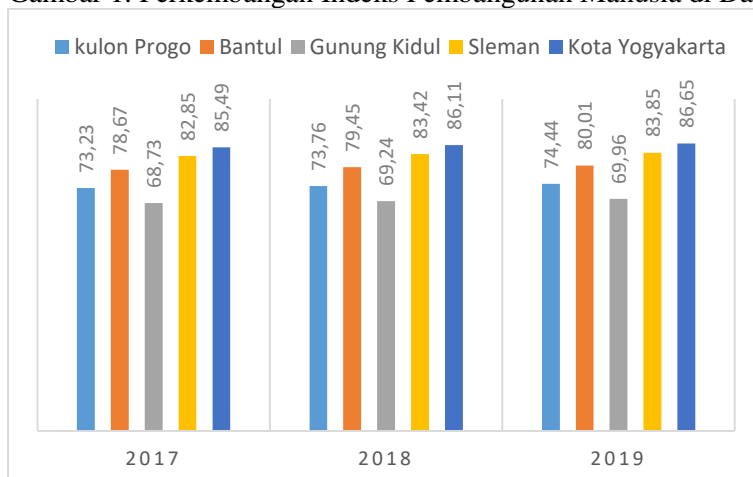
United Nations Development Program tahun 1990 memberikan formula pengukuran pembangunan manusia dikenal Indeks Pembangunan Manusia. Pengukuran tersebut memiliki tiga dasar indikator yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat daya beli masyarakat. Ketiga komponen tersebut mengarah kepada satu tujuan yaitu perubahan kualitas hidup manusia. Pada dasarnya, IPM akan mengalami peningkatan jika manusia mendapatkan akses pendidikan yang lebih, kehidupan yang lebih layak dan menikmati pendapatan perkapita yang tinggi. Apabila masyarakat memiliki pendidikan yang lebih tinggi maka akan bekerja lebih kompetitif sehingga negara dapat memiliki human resources yang berkualitas dan kompeten

Indeks pembangunan manusia tidak hanya tentang kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Adanya ketersediaan lapangan kerja, infrastruktur, fasilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah semuanya berdampak pada IPM. Penyediaan infrastruktur oleh pemerintah merupakan salah satu strategi untuk mendukung pertumbuhan masyarakat. Investasi di bidang infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah akan mengarah pada ekspansi ekonomi. Arah kebijakan pemerintah dapat dilihat dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks ini adalah prioritas kebijakan pemerintah dalam membiayai sektor publik (Ningrum et al., 2020)

Dengan ekonomi dalam produktifitas nasional akan meningkat. Maka konsep IPM memiliki arti yang luas walaupun fakta mengatakan bahwa pembangunan manusia di Indonesia juga belum merata. Terbukti terjadi ketimpangan antar wilayah, yang menjadi alasan dasar dalam ketersediaan perbedaan infrastruktur. Nilai IPM provinsi Papua menjadi wilayah yang paling rendah dengan nilai sebesar 60,84 dan termasuk dalam kategori sedang. Berbanding terbalik dengan DKI Jakarta yang memiliki nilai 80,76 termasuk dalam kategori sangat tinggi (Baeti, 2013)

Menurut *Human Development Report* tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 114 dari 190 negara dengan skor 0,716. Angka ini menunjukkan bahwa IPM Indonesia termasuk dalam kategori tinggi dan meningkat sebesar 0,008 sejak tahun 2018. Rata-rata angka harapan hidup saat lahir di Indonesia adalah 71,34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir dapat hidup antara 71 hingga 72 tahun. Sektor pendidikan juga menunjukkan bahwa anak muda Indonesia rata-rata menghabiskan 8,34 tahun di sekolah. Angka-angka ini menunjukkan bahwa orang Indonesia biasanya menyelesaikan delapan hingga sembilan tahun pada pendidikan. Masyarakat Indonesia membelanjakan rata-rata sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah per orang per tahun untuk ekonomi (BPS, 2019).

Gambar 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2019.

Perkembangan pembangunan manusia dalam skala kota dan kabupaten juga tidak berbeda dengan masalah skala nasional. Terbukti perkembangan nilai IPM dalam skala kabupaten atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda satu sama lain, seperti terlihat pada grafik di atas. Dengan perolehan skor 86,65 persen pada tahun 2019, Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori sangat tinggi dan memiliki skor IPM tertinggi. Dengan skor 83,58 persen, Kabupaten Sleman menduduki peringkat kedua dengan peringkat kategori sangat tinggi. Dengan nilai masing-masing 80,01 persen dan 74,44 persen, baik Kabupaten Bantul maupun Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam kategori tinggi. Gunung Kidul termasuk dalam kategori sedang dan memiliki skor terendah yaitu 69,96 persen. Perbedaan data tersebut ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak merata dan tidak memiliki kesenjangan. Sebagai indikator IPM, perbedaan kualitas pembangunan manusia antar daerah sering terjadi di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. (BPS, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini ditujukan menganalisis peningkatan pembangunan ekonomi untuk kualitas hidup manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peran kemiskinan, belanja modal, upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai determinan kualitas pembangunan manusia di dalam penelitian ini.

## 2. Literature Review

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah proses mengubah struktur ekonomi suatu negara untuk meningkatkan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan tetap memperhatikan faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Seluruh alokasi, kelembagaan, sosial, struktur produksi, dan budaya merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang lebih multidimensional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan jenis pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari pergeseran struktur kegiatan ekonomi suatu wilayah. (Ladjin et al., 2022).

Menurut Rostow (1959) pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses yang lebih luas pilihan dimana manusia bergerak dari masyarakat yang lebih tradisional ke masyarakat yang lebih modern. Ada tiga tahap pengeluaran pemerintah pada pembangunan ekonomi suatu negara. Tahap awal, menengah, dan lanjutan adalah tiga tahapan yang membentuk fase ini. Tahap awal mengatakan rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional cukup tinggi. Selanjutnya tahap menengah diperlukan investasi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi agar cepat landas, tetapi dalam peranan swasta sudah semakin tinggi diiringi peranan investasi yang tinggi dari pemerintah. Fase Tahap Lanjut adalah ketika pengeluaran pemerintah bergeser dari mendukung infrastruktur ekonomi menjadi mendukung layanan sosial seperti perawatan kesehatan dan pendidikan,

Belanja pemerintah merupakan bentuk pembangunan ekonomi melalui kebijakan fiskal, dimana kebijakan tersebut sebagai acuan tindakan pengatur agar tercapainya stabilitas ekonomi melalui kegiatan penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun (Harjunadhi & Rahmawati, 2020). Penelitian Masduki et al., (2022) mengatakan bahwa pengelolaan efisiensi dalam belanja akan memberikan arti penting dalam pembangunan manusia. Pembelanjaan yang efektif akan memberikan pengurangan penduduk miskin dan meningkatkan IPM. Tata kelola pemerintah dalam belanja modal akan mencerminkan kualitas pengeluaran yang penting bagi negara dan daerah-daerah tertinggal. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Wardhana et al., (2015) yang mengatakan pengeluaran pemerintah pada infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan memberikan pengaruh kepada pembangunan manusia di 54 wilayah metropolitan di Indonesia. Terbukti pengeluaran pemerintah yang total dibidang pendidikan memberikan pengaruh besar terhadap rata-rata lama bersekolah. Rekomendasi kebijakan yang tepat oleh pemerintah dalam infrastruktur dan sesuai kebutuhan setiap daerah masing-masing serta mengevaluasi pengeluaran pemerintah di sektor lainnya dapat menciptakan alokasi yang lebih efektif. Temuan Djokoto (2022) mengatakan bahwa perdagangan, dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang berkualitas menawarkan kebijakan untuk meningkatkan

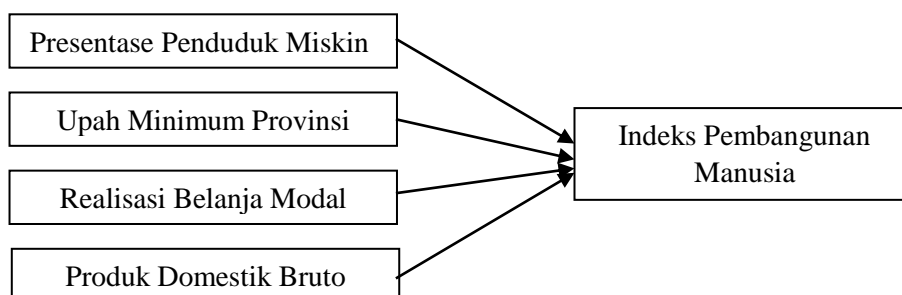
pembangunan manusia di suatu wilayah. Harahap (2022) yang mengatakan bahwa belanja pemerintah berbanding lurus dengan pembangunan manusia. Apabila anggaran belanja pemerintah naik, maka akan diikuti dengan kenaikan pembangunan manusia di dalam suatu wilayah.

Suatu negara dikatakan sejahtera apabila dapat mengatasi kemiskinan. Problem kemiskinan apabila tidak dapat diatasi, maka regulator yang disebut pemerintah telah gagal memberikan kesejahteraan. Kemiskinan juga menjadi masalah pelik dalam menghambat pembangunan ekonomi maupun pembangunan kualitas hidup manusia. Bukti menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara terbesar ke-4 di dunia dalam hal demografi. Jumlah penduduk yang cukup besar akan memberikan efek dalam proses pembangunan apabila tidak terorganisir dengan baik. Pertumbuhan populasi tidak hanya mencakup jumlah akan kuantitas namun mencakup kualitas kesejahteraan penduduk dan pembangunan kualitas hidup manusianya (Tumpal, 2013). Temuan penelitian Mirza (2011) menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif karena apabila tingkat kemiskinan mengalami penurunan, maka akan menaikkan IPM. Sebaliknya menurut temuan Harahap (2022) pengaruh penduduk miskin tidak berpengaruh apapun kepada penurunan dan peningkatan dalam pembangunan manusia.

Pengaruh tersebut didukung Kiha et al., (2021) oleh penelitian yang mengatakan bahwa jumlah penduduk, pengangguran, kemiskinan mempunyai hubungan yang kuat terhadap IPM di Kabupaten Belu. Masalah keterbelakangan dan berkurangnya peluang pembangunan muncul dari pertumbuhan penduduk yang cepat. Pendapatan dan permintaan domestik tidak akan meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk tanpa adanya faktor pendukung lainnya. Ekspansi ekonomi, tingkat kejahatan yang tinggi, stabilitas politik, dan kemiskinan semuanya akan menderita sebagai akibat dari penambahan penduduk yang besar. Karena jumlah penduduk miskin memiliki keterbatasan aspek kebutuhan akan fasilitas pemerintah. Selain masalah penduduk, masalah upah yang minim juga akan memberikan dampak pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat serta efek yang paling buruk adalah kualitas hidup layak akan masyarakat akan menurun (Nurhardiansyah et al., 2017)

Nilai IPM menunjukkan bahwa individu memiliki akses terhadap semua hasil pembangunan, termasuk pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Modal manusia memiliki dua hal dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan memberikan sebuah investasi dalam menggapai kehidupan lebih layak. Kesehatan adalah bentuk kesejahteraan dasar manusia. Keduanya merupakan hal dasar dalam membangun sebuah peradaban (Todaro & Smith, 2015).

Gambar 2. Kerangka Berpikir



### Hipotesis Penelitian

Pada dasarnya, hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji. Pada penelitian ini, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Presentase Penduduk Miskin diduga berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Upah Minimum Provinsi diduga berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Realisasi Belanja Modal diduga berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Produk Domestik Bruto diduga berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana ditujukan menguji, memverifikasi, menghubungkan dan mengobservasi data secara prosedural statistik (Musianto, 2002). Penelitian ini ditujukan menguji hubungan antara kemiskinan, UMP, belanja modal pemerintah terhadap IPM. Data panel yang digunakan terdiri dari ruang lingkup lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan observasi tahun 2013 hingga 2019. Informasi data kelima faktor tersebut diambil dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta. Uji regresi mencakup Common Effects, Fixed Effects, dan Random Effects, yang semuanya dapat ditemukan di panel data. Uji seperti Likelihood Ratio (Chow), Hausman Test, Lagrange Multiplier ditujukan untuk menentukan model terbaik (Gujarati, D. N., & Porter, 2009).

Menurut Gujarati, D. N., & Porter, (2009) regresi merupakan sebuah analisis statistik yang ditujukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antar variabel dependen dengan variabel independen. Berikut ini adalah model persamaan regresi data panel:

$$IPMit = \alpha_i + \beta_1 PPMit + \beta_2 UMPit + \beta_3 RBMit + \beta_4 PDRBit + uit$$

Dimana, IPM merupakan proksi kualitas hidup manusia dengan ukuran indeks pembangunan manusia, PPM merupakan presentase penduduk miskin, UMP merupakan upah minimum provinsi, PDRB merupakan produk domestik bruto atas harga konstan 2010.

#### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan sebuah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Adapun definisi operasional variabel penelitian ini antara lain:

1. Variabel Dependen  
Indeks Pembangunan Manusia  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah ukuran perbandingan dimana angka harapan hidup, standar hidup layak (produk nasional bruto per kapita), angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah dijadikan dasar sebagai ukuran keberhasilan kualitas hidup manusia. IPM dilihat dalam 4 kategori, yaitu sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ), tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ), sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ) dan rendah ( $IPM < 60$ ). IPM merupakan gambaran kesuksesan pemerintah dalam penyelenggaraan kemakmuran masyarakat.
2. Variabel Independen
  - a. Presentase Penduduk Miskin  
Presentase Penduduk Miskin adalah sebuah presentase penduduk dimana berada di bawah garis kemiskinan. Indeks ini secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin.
  - b. Upah Minimum Provinsi  
Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan sebuah upah yang berlaku di dalam kabupaten dan kota pada satu provinsi. Penentuan UMP ditetapkan oleh gubernur dengan rekomendasi oleh dewan pengupahan provinsi dan didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

- c. **Realisasi Belanja Modal**  
 Realisasi Belanja Modal adalah alokasi anggaran yang direncanakan oleh pemerintah dalam memperoleh aset tetap yang memiliki nilai ekonomi lebih dari satu periode akuntansi seperti properti, tanah, pabrik, peralatan dan gedung.
- d. **Produk Domestik Bruto**  
 Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan total dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu tertentu oleh suatu negara. PDB merupakan salah satu cara dalam menghitung pendapatan nasional dalam suatu negara. Unit produksi pada PDB terdiri dari 9 sektor antara lain: 1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri pengolahan 4. Listrik, gas dan air bersih, 5. Konstruksi, 6. Perdagangan hotel dan restoran, 7. Pengangkutan dan komunikasi, 8. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan, 9. Jasa-jasa, termasuk jasa pemerintah.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Model terbaik dipilih untuk menentukan besarnya hubungan antara kemiskinan, UMP, dan jumlah yang dikeluarkan pemerintah untuk HDI di semua kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Estimasi panel model regresi menghasilkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Panel

Variabel	Koefisien Model		
	Common	Fixed	Random
Konstanta	199,8275	-66,4514	199,8275
Kemiskinan	-1,72244	-0,0142	-1,72244
UMP	-1,468	2,885221	-1,468
Belanja Modal	1,369799	0,481015	1,369799
Pertumbuhan Eko.	-6,44842	5,613589	-6,44842
R Square	0,923231	0,99905	0,923231
F-Statistic	90,19607	3416,695	90,19607
Prob F-Statistic	0	0	0

Sumber: Pengolahan Data BPS pada Eviews.

Uji Chow difungsikan untuk menentukan pemilihan model terbaik antara fixed effect dan random effect. Berdasarkan tabel 2, probabilitas F mendapat hasil sebesar 0,0000 dimana lebih kecil dari nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$ , maka dapat diputuskan model terpilih adalah fixed effect. Selanjutnya, pengujian hausman test difungsikan untuk membandingkan model terbaik antara fixed effect dan random effect. Berdasarkan tabel 3, hasil dari probabilitas *chi square* 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$ , maka dapat diputuskan model terpilih adalah fixed effect. Model Fixed Effect terpilih akan digunakan untuk mngestimasi hubungan antara kemiskinan, UMP, belanja modal pemerintah terhadap IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 hingga 2019.

Tabel 2. Pemilihan Pada Model Terbaik

	Chow Test	Hausman Test
Effect Test	Cross-section F	Cross-section (Chi Square)
Statistik	518,5894	2074,358
Deggre Of Freedom	-4,26	4
Probabilitas	0	0

Sumber: Pengolahan Data BPS pada Eviews.

Berdasarkan tabel 3, variabel IPM dipengaruhi oleh variabel kemiskinan, UMP, belanja modal dan PDRB secara simultan. Selanjutnya secara partial, variabel kemiskinan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Lalu diikuti belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sedangkan temuan lainnya, variabel UMP dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pengujian diagnosis oleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) menghasilkan nilai 0,999050, artinya 99,9050% variasi IPM dipengaruhi kemiskinan, UMP, belanja modal dan PDRB, sisanya 0,095% dipengaruhi oleh factor lain diluar model.

Tabel 3. Regresi Model Fixed Effect

$\text{IPMit} = -66,45139 + -0,014197 \text{PPMit} + 2,885221 \text{UMPit} + 0,481015 \text{BMit} + 5,613589 \text{PDRBit}$		
$(0.0007) \quad (0.8366) \quad (0.0198) \quad (0.2688) \quad (0.0028)$		
R Square = 0,999050	F Statistik = 3416,695	Prob. F Statistik = 0,000000

Sumber: Pengolahan Data BPS pada Eviews.

Dampak kemiskinan terhadap IPM dalam penelitian ini muncul bahwa kemiskinan membuat hasil yang negatif dan tidak signifikan. Hasil ini didukung oleh penelitian (Khikmah et al., 2018) yang sampai pada kesimpulan bahwa kemiskinan juga memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan. Disisi lain, Yusuf & Dai, (2020) menyimpulkan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa beban pembangunan suatu negara akan meningkat secara proporsional dengan jumlah penduduk miskinnya. Masyarakat miskin memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Intinya, masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan gaji yang baik akan terhindar dari kemiskinan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi suatu negara. IPM memainkan peran penting dalam menggambarkan kemiskinan. IPM dihitung dengan menggunakan indikator seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita. Pembangunan manusia dipengaruhi oleh peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan karena semakin rendah jumlah penduduk miskin di suatu wilayah, semakin baik pembangunan manusia yang ada (Fatimah, 2014).

Pengaruh belanja modal terhadap IPM pada penelitian ini adalah belanja modal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM. Hasil ini juga didukung penelitian Komariah et al., (2019) yang menyimpulkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap IPM secara partial. Disisi lain, menurut penelitian Mirza, (2011) bahwa belanja modal memiliki dampak yang signifikan terhadap IPM secara positif. Karena belanja modal dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan peningkatan sumber daya manusia, maka diketahui bahwa hubungan antara IPM dan belanja modal saling berhubungan. Kondisi ini mencontohkan pembentukan modal belanja untuk memenuhi kebutuhan dasar dan transformasi belanja publik menjadi aset tidak berwujud yang dapat mendorong pembangunan sumber daya manusia (Komariah et al., 2019).

Pengeluaran pemerintah yang bersifat endogen adalah dampak dari perkembangan ekonomi. Pembangunan sebuah infrastruktur karena adanya pembangunan ekonomi akan mengakibatkan meningkatnya investasi dan mengubah kesejahteraan sumber daya manusia. Pembangunan yang dikelola secara efektif dengan produktifitas dan tersedianya lapangan pekerjaan yang ada akan meningkatkan pembangunan ekonomi. Kinerja ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui nilai produk domestik regional bruto dan produktifitas prekonomian daerah (Wongkar, Anjela Nadia. et al., 2023).

Pengaruh UMP terhadap IPM pada penelitian ini adalah variabel UMP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Harjunadhi & Rahmawati (2020) yang menyimpulkan bahwa variabel UMP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Peran keterkaitan antara UMP dan IPM adalah tentang pendapatan yang diterima masyarakat. Pada

penelitian ini menghasilkan bahwa UMP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Upah pada dasarnya merupakan bentuk biaya yang terbebankan pada perusahaan. Tingkat produksi perusahaan sangat rentan pada perubahan upah, sehingga perusahaan akan memberikan opsi pengurangan karyawan. Meningkatnya sebuah upah akan membuat kebutuhan tenaga kerja berkurang sehingga berpengaruh pada penurunan tenaga kerja dan skala produksi. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan upah adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan sebagai peningkatan sumber daya manusia. SDM yang terampil akan memberikan peningkatan perusahaan sehingga pendapatan perusahaan akan meningkat. Meningkatnya UMP akan meningkatkan bentuk daya beli masyarakat baik dari pola konsumsi dan investasi, sehingga akan memberikan sebuah pola perubahan baru di bidang pendidikan dan kesehatan (Harjunadhi & Rahmawati, 2020; Masduki et al., 2022)

Pengaruh PDRB pada penelitian ini adalah PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil tersebut didukung kuat oleh penelitian Imelda et al., (2021) bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan erat dengan pengeluaran pemerintah seperti infrastruktur. Infrastruktur pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Belanja modal juga dapat memberikan sebuah pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Tingginya pertumbuhan ekonomi memberikan perubahan dalam kualitas hidup layak pada masyarakat. Daya beli masyarakat berubah seiring pertumbuhan ekonomi. IPM dapat dipengaruhi oleh perubahan pendapatan karena daya beli yang tinggi. Hal ini cenderung beralasan bahwa perkembangan moneter yang tinggi akan memberikan peningkatan nilai IPM (Islamiatus Izzah & Martha Hendarti, 2021).

## 5. Simpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi yang diwakili kemiskinan, UMP, belanja modal dan PDRB berpengaruh pada IPM secara simultan. Namun secara partial, variabel kemiskinan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sedangkan temuan lainnya, variabel UMP dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pengambilan keputusan dalam alokasi anggaran pemerintah yang efisien dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Peningkatan pembangunan manusia dengan diiringi meningkatnya infrastruktur akan mencapai sebuah kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah yang efektif dan efisien mencerminkan kualitas pengeluaran yang penting bagi setiap negara atau daerah, khususnya daerah tertinggal, untuk meningkatkan pembangunannya, terutama untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan IPM. Kenaikan PDRB juga tidak secara langsung memberikan perbaikan perubahan dalam kualitas hidup masyarakat. Kenaikan PDRB hanya akan berpengaruh pada pembangunan manusia diiringi dengan rata-rata distribusi pendapatan perkapita agar masyarakat dapat secara baik memenuhi kebutuhan dasar.

## 6. Daftar Pustaka

- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Povinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Edaj*, 2(3), 85–98.
- BPS. (2019). Indeks Pembangunan Manusia 2019. *Badan Pusat Statistik, BPS (Statistics Indonesia)*.
- Djokoto, J. G. (2022). The investment development path and human development: Is there a nexus? *Research in Globalization*, 4(December 2021), 100079. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2021.100079>
- Fatimah, S. N. (2014). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten Tahun 2010-2015. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. (2009). Basic Econometrics. In *Mc Graw Hill, New York* (Vol. 82, Issue 326). <https://doi.org/10.2307/2230043>
- Harahap, D. A. (2022). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi IPM di Indonesia. *Universitas*



*Islam Indonesia.*

- Harjunadhi, J. T., & Rahmawati, F. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan UMP terhadap IPM di Indonesia Tahun 2014–2018. *Inovasi Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 16(2), 241–249. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/7272>
- Imelda, R., Balafif, M., & Wahyuni, S. T. (2021). Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998-2017. *Bharanomics*, 1(2), 67–74. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.155>
- Islamiatus Izzah, C., & Martha Hendarti, I. (2021). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, Dan Pdrb Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Jawa Tengah. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, V, 99–106. <https://doi.org/10.23969/oikos.v5i2.3392>
- Khikmah, Z., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2018). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap IPM DI Pulau Sulawesi 2011-2018. *DINAMIC: Directory Journal Of Economic Volume 2 Nomer 4Of Economic Volume 2 Nomer 4*, 2(4), 1127–1142.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Belu. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 60–84. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/426>
- Komariah, D., Yogiantoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4, 523–532.
- Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, A. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Widina.
- Masduki, U., Rindayati, W., & Mulatsih, S. (2022). How can quality regional spending reduce poverty and improve human development index? *Journal of Asian Economics*, 82(June), 101515. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101515>
- Mirza, D. S. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah. *Jejak*, 4(2), 102–113.
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4(2), 123–136. <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 212–222.
- Nurhardiansyah, A., Istiyani, N., & P, F. W. (2017). Pengaruh IPM , PDRB , UMP dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2006 - 2015. *Journal Ekulibrium*, II(2), 56–61.
- Rostow, W. W. (1959). The Stages Of Economic Growth. *Society*, 12(1), 1–16.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (11th ed.). Salemba Empat : Jakarta.
- Tumpal, M. (2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue Dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 9(2), 107–124. <https://doi.org/10.33830/jom.v9i2.41.2013>
- Wardhana, A., Nur, Y. H., Kharisma, B., & Adam, A. M. (2015). Metropolitan Indonesia the Role of Government Expenditure on Human Development Improvement in the Metropolitan Region : the Case of Indonesia. *CR Journal*, 07(01), 1–10.
- Wongkar, Anjela Nadia. Rotinsulu, Tri Oldy. Maramis, M. T. B. (2023). Pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3), 49–60.
- Yusuf, L. A., & Dai, S. I. (2020). The Impact of Unemployment and Human Development Index on

Poverty in Gorontalo Province 2008-2017. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(1), 7–16.  
<https://doi.org/10.37479/jej.v2i1.4495>

### **Acknowledgement**

The research is financed by Asian Development Bank. No. 2006-A171. Thanks for Prof. AAA BBB, World Technology University.

### **Copyright Disclaimer**

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.